

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
MALANG NOMOR 372/Pid.B/2010/PN.MLG TENTANG  
TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

**JURNAL ILMIAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :  
SHOIMATUL FITRIANA  
NIM. 0910110235**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2013**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG  
NOMOR 372/Pid.B/2010/PN.MLG TENTANG  
TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

Shoimatul Fitriana, Bambang Sudjito & Setiawan Nurdayasakti

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email: pipit.chand@gmail.com

**Abstraksi:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian putusan hakim Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG dalam memenuhi rasa keadilan terutama melindungi hak-hak korban perkosaan dan ketertiban masyarakat. Disini penulis meneliti mulai dari Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, Surat Dakwaan, berita acara pemeriksaan di Pengadilan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hingga putusan terkait kasus perkosaan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yakni meneliti kasus perkosaan yang hanya diputus pidana selama 1 tahun 6 bulan dikaitkan dengan Pasal 285 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun. Dari penelitian ini diharapkan ke depan dapat tercipta putusan-putusan hakim yang lebih memperhatikan nilai-nilai keadilan dan ketertiban masyarakat.

**Abstract:** This study aims to identify and analyze the suitability of the judge's ruling 372/Pid.B/2010/PN.MLG Number sense of fairness, especially in protecting the rights of victims of rape and public order. Here the authors examined ranging from Police Interrogation, indictment, investigation report in court, the Public Prosecutor demands, decisions related to the rape case. This research was conducted with the approach of legislation and case approach to examine the rape cases that only criminal disconnected for 1 year 6 months was associated with Article 285 of the Criminal Code with a maximum penalty of 12 years. From this study are expected to be created before the decisions of judges are more concerned with the values of justice and public order.

**Kata kunci:** Putusan Pengadilan, PN Malang, Tindak Pidana Perkosaan

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum. Dalam hal ini, hukum sebagai ‘penguasa tertinggi’ untuk mengatur segala aspek kehidupan. Konsep negara hukum ini memiliki salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi yaitu peradilan yang bebas dan tidak memihak. Prinsip tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh lembaga peradilan di Indonesia. Pada dasarnya hakim memiliki kebebasan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan dalam persidangan. Namun kebebasan ini dibatasi oleh kemandirian hakim untuk tidak terpengaruh dengan pihak-pihak lain dan berpegang teguh pada pendiriannya.

Dalam mengeluarkan putusan, hakim harus memperhatikan nilai-nilai keadilan masyarakat terutama keadilan bagi korban, dalam hal ini sebagai korban perkosaan. Perkosaan ditempatkan sebagai contoh perbuatan kriminalitas yang melanggar HAM perempuan karena lebih memposisikan keunggulan diskriminasi *gender*, yang mengakibatkan perempuan sebatas diperlakukan sebagai objek pemuasan kepentingan biologis kaum laki-laki.<sup>2</sup> Perempuan dianggap lemah sehingga mudah untuk diperkosa. Perkosaan termasuk salah satu perbuatan jahat dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan penderita fisik, sosial maupun psikologis bagi perempuan sebagai korbannya. Praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan.<sup>3</sup> Dalam hal ini korban perkosaan sudah cukup menderita karena perbuatan jahat terhadap dirinya. Namun dalam pemeriksaan untuk mencapai keadilan baginya ia harus masih dipaksa untuk menguak kembali secara detail penderitaannya ketika diperkosa sesuai apa yang dialaminya mulai dari

---

1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).

2 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 64.

3 **Ibid**, hal. 74..

pemeriksaan di Kepolisian hingga pemeriksaan sidang di Pengadilan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban masih harus menerima kekecewaan ketika mendapati putusan yang dijatuhkan pada pelaku yang memerkosanya cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi perempuan.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai posisi kasus dari putusan Pengadilan Negeri Malang dengan nomor: 372/Pid.B/2010/PN.MLG: Perkosaan terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 sekitar jam 06.00 WIB di rumah kontrakan Jl. Anggrek No. 23 Malang (alamat dirahasiakan), berawal antara terdakwa WAWAN (bukan nama sebenarnya) dengan korban AYU (bukan nama sebenarnya) menjalin hubungan sebagai teman dekat (pacaran) selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun, yang akhirnya hubungan antara terdakwa dengan korban putus. Selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2010, terdakwa berjanji kepada korban untuk bertemu guna menyelesaikan permasalahan antara keduanya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret sekitar jam 06.00 WIB terdakwa menjemput korban AYU di dekat kos-kosan Jl. Cempaka No. 32. Selanjutnya terdakwa WAWAN membawa korban AYU menuju rumah kontrakan di Jl. Anggrek No. 23 Malang dan mengajak korban AYU ke kamar teman terdakwa WAWAN yakni saksi HENDRA kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar. Selanjutnya korban AYU dan terdakwa ngobrol dengan posisi duduk berhadapan, pada saat itu terdakwa mengutarakan niatnya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Karena korban menolak terdakwa emosi dan mulai bersikap kasar kepada korban. Selanjutnya terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri korban beberapa kali. Setelah itu korban berusaha berdiri dan berusaha akan meninggalkan kamar. Melihat sikap korban tersebut, terdakwa marah dan korban berusaha berteriak dan terdakwa mengancam kepada korban dengan mengatakan kalau korban berteriak dan membuat warga kontrakan teganggu, maka terdakwa akan memanggil teman-temannya untuk menyetubuhi korban secara bergantian atau bergilir. Karena takut, korban AYU tidak berani meninggalkan kamar dan tetap berada di dalam kamar. Setelah itu terdakwa

membuka paksa jaket dan baju yang dikenakan oleh korban dan korban berusaha menolak dengan memegang erat jaket yang dikenakan dengan tangannya agar tidak terlepas. Selanjutnya korban berusaha melawan dengan menendang perut terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya. Mengetahui reaksi korban tersebut terdakwa kemudian mencekik leher korban dengan tangan kanannya. Setelah itu terdakwa membuka paksa celana panjang korban dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah itu terdakwa melepas tali BH korban, oleh karena korban berusaha memberontak kemudian terdakwa menampar kembali wajah korban dan selanjutnya terdakwa menjambak rambut korban. Kemudian terdakwa membenturkan kepala bagian belakang korban kearah monitor komputer sebanyak satu kali sampai korban merasakan pusing. Setelah itu terdakwa membuka BH dan celana dalam korban hingga korban dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang. Kemudian dengan memakai kamera, terdakwa memfoto tubuh korban dalam keadaan telanjang dan terdakwa mengatakan kepada korban “apabila korban menyakiti terdakwa, maka foto tersebut akan disebarluaskan.” Kemudian terdakwa mendorong tubuh korban dan terdakwa mencium korban dan korban tidak berusaha melawan karena takut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dengan gerakan keluar masuk hingga alat kelamin korban mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan korban.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum<sup>4</sup> Nomor: 9/II/0BG/2010, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

---

4 Visum et Repertum adalah hasil pemeriksaan seorang dokter, tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang ia dengar, sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya, dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana. Aktivitas seorang dokter ahli kehakiman sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan berdasarkan permintaan dari pihak yang berkompeten dengan masalah tersebut. Visum et Repertum merupakan surat yang dibuat atas sumpah jabatan, yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan. Waluyadi, **Ilmu Kedokteran Kehakiman: dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran**, Djambatan, Jakarta, 2005, hal. 37.

1. Selaput dara wanita ini seperti wanita yang baru pertama kali bersetubuh;
2. Ditemukan sel mani pada liang senggama;
3. Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan;
4. Wanita ini tidak hamil.

Pada putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yakni kesatu Pasal 285 KUHP atau kedua pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, serta kemudian menuntut pidana selama 1 (satu) tahun penjara dan Majelis Hakim memutus dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

### **PERMASALAHAN**

1. Apakah putusan hakim Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG sudah sesuai dalam memenuhi rasa keadilan terutama melindungi hak-hak korban perkosaan dan ketertiban masyarakat?
2. Bagaimana seharusnya putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang memenuhi rasa keadilan terutama perlindungan hak-hak korban perkosaan dan ketertiban masyarakat?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti putusan Nomor: 372/Pid.B/2010/PN.MLG. Penulis meneliti dan menganalisis kesesuaian putusan hakim Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG dalam memenuhi rasa keadilan terutama melindungi hak-hak korban perkosaan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Statuta Approach*, yaitu pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah pasal 285 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan serta menggunakan pendekatan *Case Approach* yakni pendekatan kasus dengan meneliti kasus pada putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 372/Pid.B/2010/PN.MLG. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 372/Pid.B/2010/PN.MLG tentang tindak pidana perkosaan yang diperoleh melalui permohonan terhadap Panitera Pengadilan Negeri Malang dikumpulkan dengan bahan-bahan hukum yang ada melalui survey di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan perpustakaan pribadi penulis untuk mencari data-data yang dibutuhkan, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan, pidana dan pemidanaan,

sistem peradilan pidana serta karya tulis ilmiah yang dibuat oleh kalangan ahli hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti serta peraturan yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan yakni Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## **PEMBAHASAN**

### **Kesesuaian Putusan Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG dalam Memenuhi Rasa Keadilan Terutama Melindungi Hak-hak Korban Perkosaan dan Ketertiban Masyarakat**

Perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.<sup>5</sup> KUHP pasal 285 menyebutkan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pengertian dalam pasal ini memfokuskan pada jenis perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau adanya paksaan. Apabila rumusan perkosaan di atas dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatannya: memaksa;
- b. Caranya:
  - 1) Dengan kekerasan;
  - 2) Ancaman kekerasan;
- c. Objek: seorang perempuan bukan istrinya;
- d. Bersetubuh dengan dia.

Pengertian perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang

---

5        Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak-Hak Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 40.

menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.<sup>6</sup> Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam yaitu:

- a. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya, atau
- b. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.

Memaksa pada pasal 285 yakni bersetubuh dengan dia, atau bersedia disetubuhi. Cara-cara memaksa disini terbatas dengan dua cara, yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan. Pasal 89 merumuskan perluasan arti dari kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Memaksa disini yakni dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar atau kuat secara tidak sah. Jadi, kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapat didefinisikan sebagai suatu upaya yang ditujukan pada orang lain dimana untuk mewujudkannya identik dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, sehingga mengakibatkan orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Karena dalam keadaan yang tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya tersebut.

Sedangkan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik yang dapat berupa perbuatan persiapan untuk melakukan kekerasan fisik yang besar atau lebih besar yang akan dilakukan setelahnya apabila ancaman tersebut diindahkan oleh pihak yang diancam. Diharapkan dengan ancaman kekerasan tersebut dapat membuat korban ketakutan sehingga pelaku dapat melakukan perbuatan jahatnya kepada korban karena ketakutan dan ketidakberdayaan korban. Ketika korban merasa tidak berdaya akibat ancaman kekerasan pada dirinya, maka korban dapat

---

6 Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 63.



melakukan persetubuhan tanpa perlawanan dari korban. Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting, yaitu:<sup>7</sup>

1. Aspek objektif, ialah:
  - a. Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna;
  - b. Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).
2. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yakni bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Kekerasan dan ancaman kekerasan ditujukan pada seorang perempuan yang bukan isterinya. Antara kekerasan dengan ketidakberdayaan perempuan itu terdapat hubungan kausal, dan karena tidak berdaya itulah persetubuhan dapat terjadi. Jadi sebenarnya terjadinya persetubuhan pada dasarnya adalah akibat perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan itu. Oleh karena itu, perkosaan ini adalah tindak pidana material, bukan tindak pidana formal walaupun dirumuskan juga perbuatan yang dilarang dalam pasal 285 yakni memaksa.

Pada kasus tersebut telah terbukti bahwa untuk mencapai apa yang diinginkan oleh pelaku, maka ia melakukan paksaan dengan kekerasan dan ancaman-ancaman yang dapat merugikan korban sehingga korban dengan terpaksa menuruti keinginan dari pelaku perkosaan tersebut. Disini korban adalah mantan

---

7 **Ibid**, hal. 66.

pacarnya sendiri. Korban dan pelaku belum menikah, sehingga unsur seorang perempuan yang bukan isterinya terpenuhi. Serta hasil dari Visum Et Repertum yang menyebutkan bahwa antara pelaku dan korban telah terjadi penetrasi yakni hubungan badan diantara keduanya sehingga unsur bersetubuh dengan dia juga telah terpenuhi. Pelaku telah sah melanggar ketentuan Pasal 285 KUHP yakni melakukan tindak pidana perkosaan.

Di dalam ketentuan Pasal 285 KUHP, disebutkan bahwa ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan adalah 12 tahun. Namun pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG, terdakwa perkosaan hanya diputus selama 1 tahun 6 bulan penjara. Bahkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan tersebut telah dijalani terdakwa selama proses pemeriksaan, sehingga ketika proses pemeriksaan berakhir, pidana baginya berakhir juga. Jika demikian, maka sama halnya dengan terdakwa tersebut tidak dipidana.

Menurut teori relatif, tujuan dari pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Yang menjadi tujuan adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Menurut sifat tujuannya teori ini dapat dibagi tiga macam, yaitu:

a. Untuk menakuti.

Dari putusan pidana yang hanya 1 tahun 6 bulan tersebut, dirasa tidak cukup untuk menakut-nakuti pelaku pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perkosaan. Sehingga kemudian masyarakat bisa saja kemudian berfikir bahwa hukuman dari tindak pidana perkosaan tidak berat, hanya 1 tahun 6 bulan sehingga tidak perlu takut untuk melakukan tindak pidana perkosaan. Sedangkan adanya pidana itu sendiri dimaksudkan supaya orang takut untuk melakukan tindak pidana. Putusan pidana yang sangat ringan pada pelaku tindak pidana perkosaan, justru menjadikan orang dapat berbongong-bongong untuk melakukan tindak pidana perkosaan

b. Untuk memperbaiki.

Apabila putusan perkosaan tersebut hanya 1 tahun 6 bulan, maka tidak akan memperbaiki terdakwa perkosaan untuk tidak melakukan perbuatannya lagi di kemudian hari. Dimana seharusnya pidana diharapkan menjadikan pelaku tindak pidana perkosaan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terpidana, sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar aturan hukum lagi.

c. Untuk melindungi.

Tujuan hukum ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan dipidanya terdakwa tersebut, maka masyarakat dapat terlindungi dari para pelaku tindak pidana. Sedangkan apabila putusan yang dijatuhkan hakim hanya 1 tahun 6 bulan saja, tidak akan membuat masyarakat merasa dilindungi keamanannya.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG tersebut belum memenuhi rasa keadilan terutama melindungi hak-hak korban dan ketertiban masyarakat, karena:

1. Putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan saja tidak akan membuat terdakwa takut untuk tidak melakukan perbuatan perkosaan lagi di kemudian hari. Sehingga terdakwa tidak akan pernah jera untuk melakukan perkosaan karena ancaman pidanya sangatlah ringan. Justru korbanlah yang akan merasa takut karena pidana bagi terdakwa yang sangat ringan dan cepat berakhir tersebut, akan mengancam keselamatan jiwa korban lagi ketika terdakwa bebas,
2. Putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan saja tidak akan memperbaiki diri dan moral terdakwa. Dimana seharusnya pidana dapat menjadikan seseorang akan berubah menjadi lebih baik di kemudian hari, berguna bagi masyarakat dan tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.
3. Putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan saja tidak akan melindungi masyarakat dari ancaman perkosaan. Dengan putusan pidana yang sangat ringan tersebut dikhawatirkan justru tindak pidana perkosaan akan

semakin marak terjadi. Sehingga masyarakat terutama perempuan akan terganggu keselamatannya.

### **Putusan Hakim yang Seharusnya Memenuhi Rasa Keadilan Terutama Perlindungan Hak-hak Korban Perkosaan dan Ketertiban Masyarakat**

Pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG tersebut terdakwa WAWAN dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perkosaan dengan menyalahi pasal 285 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Namun hakim hanya memutus dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan saja. Putusan tersebut dinilai sangat tidak adil terutama bagi korban terlebih pandangan masyarakat luas yang menilai ancaman pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan begitu ringan. Disini korban begitu dirugikan. Korban menderita kerugian selain fisik, psikis, perasaan takut, sedih, sakit, dan lain sebagainya. Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia ternyata kedudukan korban relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum tersebut masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender oriented*). Padahal dari perspektif kriminologis dan hukum pidana maka kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri.<sup>8</sup> Tanpa adanya perlindungan pada korban maka akan berdampak makin memperburuk keadaan korban pasca terjadinya tindak pidana. Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, kepentingan korban kejahatan diwakili Jaksa Penuntut Umum. Sehingga Jaksa Penuntut Umum diharapkan dapat membantu korban memperoleh hak-hak serta harga dirinya kembali.

Namun apabila seperti pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG tersebut yakni Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa perkosaan hanya dipidana selama 1 tahun saja. Seharusnya, pelaksanaan penuntutan harus berdasarkan hukum dan senantiasa mengindahkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kebijakan pemerintah

---

8 Menurut Daniel W. Van Ness (1993) dalam Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan**, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 5.

dalam penanganan perkara pidana.<sup>9</sup> Kemudian hakim hanya memutus dengan pidana 1 tahun 6 bulan saja. Perlindungan bagi korban dirasa sama sekali tidak terpenuhi. Sebagai lembaga yang mewakili korban kejahatan, Jaksa Penuntut Umum seharusnya dalam tuntutan pidananya lebih banyak menguraikan penderitaan korban akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku. Dengan tolok ukur demikian, maka pengajuan tuntutan pidana hendaknya berdasarkan keadilan yang ditinjau dari kacamata korban sehingga cenderung menuntut hukuman relatif tinggi. Sementara putusan hakim haruslah bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan sebagaimana Barda Nawawi Arief dari simposium pembaharuan hukum pidana nasional, yakni:<sup>10</sup>

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa persidangan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil, baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat.

Menurut Arif Gosita disebutkan bahwa jika hendak memberikan perlindungan kepada korban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara, yaitu:<sup>11</sup>

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, dengan linkuensi dan penyimpangan tersebut.

---

9 Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 69.

10 Lilik Mulyadi, **Op. Cit.**, hal. 10.

11 Menurut Arif Gosita, dalam Lilik Mulyadi, **Ibid**, hal. 13.

2. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
3. Berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya apabila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
6. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
7. Berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum.
8. Berhak mempergunakan upaya hukum (*recht middelen*).

Korban AYU sebagai pihak yang dirugikan ternyata tidak mendapat perhatian sama sekali. Seharusnya korban sebagai pihak yang paling menderita dari terjadinya tindak pidana perkosaan karena seringkali korban menjadi tidak berdaya mengatasi apa yang dialaminya baik secara fisik maupun psikis, adanya ancaman atau intimidasi yang dilakukan pelaku, ketakutan korban karena merasa dihantui perasaannya sendiri walaupun tidak ada ancaman yang bersifat nyata dan sebagainya lebih diperhatikan dalam sistem peradilan pidana. Adanya kesan keterasingan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dirasakan ketika hakim hanya memutus pidana selama 1 tahun 6 bulan pada pelaku yang memperkosanya.

Seharusnya putusan hakim mengacu pada keadilan sebagaimana teori keadilan menurut hukum. Keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan lewat proses hukum, umumnya oleh pengadilan.<sup>12</sup> Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan hukum yakni:

1. Harus ada ketentuan yang mengatur bagaimana memberlakukan manusia dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapinya.

---

12 Munir Fuady, **Dinamika Teori Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 118.

2. Ketentuan hukum tersebut harus jelas sasaran pemberlakuannya. Dalam hal ini mesti ada ketentuan yang menentukan apakah aturan hukum tersebut berlaku untuk orang dalam semua kategori, atau hanya berlaku untuk kategori orang tertentu saja.
3. Aturan hukum tersebut haruslah diterapkan secara tidak memihak dan tanpa diskriminasi kepada setiap orang yang memenuhi kualifikasi pengaturannya.

Menurut filosof Jerman Schopenhauer,<sup>13</sup> menyatakan bahwa hal yang paling inti dari suatu keadilan adalah prinsip *neminem laedere*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian dan rasa sakit bagi orang lain (Edgar Bodenheimer, 1978: 10). Menurut filosof besar Yunani Plato, keadilan merupakan kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato, “*justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues*” (Roscoe Pound, 1952: 3).

Selain Plato, filosof Yunani terkenal lainnya yaitu Aristoteles menyatakan bahwa ukuran dari keadilan adalah bahwa:<sup>14</sup>

1. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti “*lawful*”, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti; dan
2. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*) (Aristoteles, 1970: 140).

Sehingga Putusan Hakim tersebut seharusnya:

#### MENGADILI

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan.
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 92.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 93.

- c. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa ditahan.
- d. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
- e. Memerintahkan seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebani terdakwa membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG tersebut belum memenuhi rasa keadilan terutama melindungi hak-hak korban dan ketertiban masyarakat, karena:

1. Putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan saja tidak akan membuat terdakwa takut untuk tidak melakukan perbuatan perkosaan lagi di kemudian hari. Sehingga terdakwa tidak akan pernah jera untuk melakukan perkosaan karena ancaman pidananya sangatlah ringan. Justru korbanlah yang akan merasa takut karena pidana bagi terdakwa yang sangat ringan dan cepat berakhir tersebut, akan mengancam keselamatan jiwa korban lagi ketika terdakwa bebas,
2. Putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan saja tidak akan memperbaiki diri dan moral terdakwa. Dimana seharusnya pidana dapat menjadikan seseorang akan berubah menjadi lebih baik di kemudian hari, berguna bagi masyarakat dan tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.
3. Putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan saja tidak akan melindungi masyarakat dari ancaman perkosaan. Dengan putusan pidana yang sangat ringan tersebut dikhawatirkan justru tindak pidana perkosaan akan semakin marak terjadi. Sehingga masyarakat terutama perempuan akan terganggu keselamatannya.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG tersebut seharusnya:



## MENGADILI

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan.
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun.
- c. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa ditahan.
- d. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
- e. Memerintahkan seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebani terdakwa membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

## Saran

1. Penuntut umum seharusnya lebih menguraikan penderitaan korban ketika diperkosa hingga akibat yang akan dialaminya kelak pasca perkosaan, sehingga penuntut umum akan menuntut pidana maksimal kepada pelaku tindak pidana perkosaan.
2. Hakim dalam memutus perkara perkosaan seharusnya lebih menekankan pada penderitaan serta memikirkan masa depan korban nantinya sehingga dapat memutus pelaku tindak pidana dengan pidana maksimal.
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku perkosaan seharusnya setimpal sebagaimana perbuatannya supaya dapat membinasakan serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana perkosaan.

## DAFTAR PUSTAKA

A Fuad Usfa, **Pengantar Hukum Pidana: Edisi Revisi**, UMM Press, Malang, 2006.

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Agustinus Pohan, dkk. (Ed.), **Hukum Pidana dalam Perspektif**, Pustaka Larasan, Bali, 2012.
- Ahmad Mujahidin, **Peradilan Satu Atap di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Amzulian Rifa'I, dkk, **Wajah Hakim dalam Putusan: Studi atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia**, Pusham UII, Yogyakarta, Tidak Ada Tahun.
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, C.V. Saptar Artha Jaya, Jakarta, 2004.
- Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Dwidja Priyatno, **Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia**, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Leden Marpaung, **Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika, 2008.

Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, P.T. Alumni, Bandung, 2012.

Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan**, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Lilik Mulyadi, **Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

M. Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Masruchin Ruba'i, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang, 2001.

Masruchin Ruba'i, **Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, IKIP Malang, Malang, 1997.

Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Mohammad Taufik Makarao, **Hukum Acara Pidana: dalam Teori dan Praktek**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Muladi dan Dwidja Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kencana, Jakarta, 2010.

Munir Fuady, **Dinamika Teori Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

P.A.F. Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Racmad Safa'at, **Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa : Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya**, Surya Pena Gemilang, Malang, 2011.

Suryono Ekotama, dkk, **Abortus Provocatus, Bagi Korban Perkosaan Perspektif : Viktimologi**, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001.

Tongat, **Hukum Pidana Materiil**, UMM Press, Malang, 2003.

Umar Said S, **Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia**, Setara Press, Malang, 2011.

Waluyadi, **Ilmu Kedokteran Kehakiman: dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran**, Djambatan, Jakarta, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana